



## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN MATRA LAUT DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN MARITIM INDONESIA

*(Empowerment of Coastal Communities as A Reserve Component of Marine Materials in Supporting Indonesian Maritime Defense)*

Amanda Mary Kartika Palar, Rizky Thesalonika Yulyanti, Mayang A. Parasasti

Posisi: Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Strategi Pertahanan Laut,  
Universitas Pertahanan

Email: (amandamkpar@gmail.com, rizkythesalonika@gmail.com,  
mayangagnez11@gmail.com)

### **Abstrak**

Indonesia dengan luas wilayah, jumlah penduduk, serta jumlah pulau yang dimiliki menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Maka dari itu, Indonesia dapat mewujudkan cita – citanya untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Namun berdasarkan lingkungan strategis yang semakin bergerak dinamis, semakin sulit pula memprediksi ancaman yang datang, maka perlu dipertimbangkan kebijakan pertahanan berdasarkan ancamannya. Ancaman yang sewaktu – waktu diprediksi akan datang saat ini tak hanya dari ancaman militer, namun dapat dalam bentuk non-militer dan hibrida. Padahal sebagai negara kepulauan, masyarakat Indonesia juga berusaha memanfaatkan laut untuk kehidupannya terutama pada wilayah pesisir. Untuk mengurai hingga meniadakan berbagai ancaman tersebut diperlukan pertahanan maritim yang kuat. Salah satu pertahanan maritim tersebut dapat dilakukan pada wilayah pesisirnya. Pertahanan negara yang baik dapat diwujudkan melalui partisipasi dari masyarakat khususnya pada wilayah pesisir, yang sangat berpotensi dijadikan sebagai komponen cadangan dalam menopang tugas TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara. Dalam penelitian ini menjabarkan tiga teori diantaranya Strategi Pertahanan Laut, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dan Komponen cadangan matra laut. Dalam penyusunannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai penopang TNI diharapkan dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian serta pertahanan wilayah pesisir negara Indonesia untuk meningkatkan kedaulatan NKRI.

**Kata Kunci:** Strategi Pertahanan Laut, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Komponen Cadangan, Ancaman Maritim, Poros Maritim Dunia



### **Abstract**

*In terms of area, population, and the number of islands, Indonesia is the largest archipelagic country in the world. Therefore, Indonesia can realize its ideals to become the World Maritime Axis. However, the more difficult it is to predict the coming threats, the more difficult it is to consider defense policy based on the threats due to the increasingly dynamic strategic environment. The threats that will come at any time are not just military threats but can come in non-military and hybrid forms. Despite being an island nation, Indonesians also try to use the sea for their lives, especially in coastal areas. In order to analyze and eliminate these various threats, strong maritime defenses are required. One of these maritime defenses can be carried out in the coastal areas. Good national defense can be realized through community involvement, especially in coastal areas that have the potential to be used as a reserve component in support of the Indonesian Navy's task as the main component of national defense. Three theories are described in this study, including Marine Defense Strategy, Coastal Community Empowerment, and Components of Marine Reserves. When creating it, researchers used qualitative research methods. The results of this study conclude that empowering coastal communities in support of the TNI is likely to be a way to enhance the economic well-being and defense of Indonesia's coastal areas to strengthen the sovereignty of the unitary state of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Sea Defense Strategy, Coastal Community Empowerment, Military Service, Maritime Threats, World Maritime Axis*

### **1. Pendahuluan**

Menurut website World Atlas, Indonesia dengan luas wilayah, jumlah penduduk, serta jumlah pulau yang dimiliki menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau di Indonesia telah tercatat sebanyak 17.000 pulau sesuai dengan hasil kesepakatan dan koordinasi dari kementerian serta berbagai lembaga terkait dalam Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Data Pulau tahun 2021. Dari jumlah 17.000 pulau terdapat 229 pulau tambahan, dengan data sebelumnya pada data yang dikeluarkan Gazeter Republik Indonesia tahun 2020 tercatat sebanyak 16.771 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2021). Tak hanya itu, letak dari negara Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia, serta samudera Pasifik dan Hindia, menjadikan Indonesia negara yang strategis di tengah kawasan



Asia Tenggara, Asia Timur, atau Asia Pasifik, atau dapat dikatakan sebagai negara yang geostrategis.

Maka dari itu, Indonesia dapat mewujudkan cita – citanya sebagai Poros Maritim Dunia. Presiden Joko Widodo membentuk konsep yang dituangkan pada kelima pilar utama agar Indonesia diantaranya: pertama, pemerintah ingin membangun dan menciptakan kembali budaya kemaritiman di tengah masyarakat Indonesia; kedua, pemerintah meningkatkan keseriusannya dalam menangani dan menata kelola sumber daya yang ada di laut melalui pembangunan otoritas segala sumber untuk makanan yang berasal dari laut melalui eskalasi industri perikanan yang menjadikan nelayan sebagai tokoh utama; ketiga, pemerintah meningkatkan keseriusannya dalam pengarahannya agar infrastruktur meningkat serta terjadinya konektivitas bidang maritim melalui pembangunan tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata di bidang maritim; keempat, pemerintah akan melakukan kerja sama dan negosiasi di bidang maritim dengan menggandeng seluruh kementerian serta lembaga terkait baik di bidang pemerintahan maupun non-pemerintah agar dapat bersama membangun kelautan Indonesia; dan terakhir, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kekuatan pertahanan di bidang maritim (KOMINFO, 2016).

Konsep Poros Maritim Dunia yang dijalankan Indonesia juga tercantum pada Perpres RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, bahwa dengan cita – cita Indonesia untuk semakin maju, kokoh, mandiri, berdaulat sebagai negara maritim dengan meningkatkan kedudukannya untuk melindungi keamanan dan perdamaian yang merupakan kepentingan nasional di tengah dunia, maka dibentuklah konsep Poros Maritim Dunia. Hal ini dicapai dengan menjadikan kepada awal mula jati diri Indonesia sebagai bangsa yang masyarakatnya berfokus pada kepentingan maritim, melindungi kepentingan dan keamanan maritim, meningkatkan kemampuan di bidang maritim, serta melahirkan kesamarataan secara khusus pada perekonomian Indonesia. Agar cita – cita Indonesia dapat dihasilkan sebagai Poros Maritim Dunia, maka diperlukan pengelolaan dan peningkatan pembangunan bidang maritim antara



lain pada bidang infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi (KOMINFO, 2016).

Awal mulanya, konsep Poros Maritim Dunia dibangun atas pemahaman akan masa depan Indonesia pada kawasan Pasifik. Faktanya, laut Indonesia telah dijadikan sebagai jalur pelayaran dunia yang meningkatkan peran strategis Indonesia sebagai salah satu bentuk diplomasi dengan negara lain. Sehingga, kita patut memperkuat doktrin politik luar negeri pada saat ini serta masa yang akan datang melalui konsep Poros Maritim Dunia. Serta Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bersamaan dengan itu dapat dihormati pula oleh negara lain (Limbong, 2015).

Presiden Joko Widodo semakin serius menjalankan pilar ketiga melalui gagasan akan pembangunan “jalan tol laut” sebagai bentuk konektivitas antara wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya. Sehingga saat ini dapat dikatakan tidak adanya pemisah akan wilayah lain, namun laut sebagai jalur pemersatu pulau – pulau yang ada di Indonesia. Terutama dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia perlulah merintangai pulau saling berjauhan dan terpisah satu sama lain melalui konektivitas sebagai kunci utama. Dengan perubahan yang dinamis pada kawasan Indo-Pasifik, konektivitas pada pulau Indonesia serta stabilitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi isu utama agenda Poros Maritim Dunia dalam pertahanan maritim Indonesia.

Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang dikenal sebagai ALKI merupakan jalur yang digunakan pada bidang pelayaran serta penerbangan secara internasional. ALKI dapat digunakan oleh kapal ataupun pesawat udara bukan milik Indonesia (asing) di wilayah perairan yang termasuk pada yuridiksi negara Indonesia secara damai dan normal. ALKI yang berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat digunakan secara terbuka bagi seluruh kapal dan pesawat udara asing dengan tetap menjunjung tinggi *Law of the Sea Convention (LOSC)*. Oleh karena itu, penggunaan ALKI oleh seluruh negara harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pihak Indonesia.



Peraturan internasional tersebut berlaku pada perairan seluruh negara kepulauan agar lalu lintas laut selalu terjaga (Nainggolan, 2015).

Letak geografis Indonesia memiliki sebuah keunggulan kompetitif jika dibandingkan negara lain, baik secara geopolitik, geopolitik maupun geopolitik. Indonesia akan mendapat manfaat besar dari lokasi geografisnya, tetapi juga rentan terhadap ancaman terhadap keamanan maritim. Meningkatnya kepadatan jalur perairan Indonesia menyebabkan dampak negatif, diantaranya menimbulkan kerusakan pada lingkungan, tidak terkelolanya sumber daya alam di Indonesia, serta berbagai ancaman terhadap keamanan bidang maritim yang tidak dapat dihindari. Dari segi politik, posisi geopolitik, serta geostrategis sangat mempengaruhi keseimbangan pada keamanan kawasan, termasuk keamanan maritim Indonesia (Marsetio, 2014). Berdasarkan lingkungan strategis yang semakin bergerak dinamis, semakin sulit pula memprediksi ancaman yang datang, maka perlu dipertimbangkan kebijakan pertahanan berdasarkan ancamannya. Ancaman yang sewaktu – waktu diprediksi akan datang saat ini tak hanya dari ancaman militer, namun dapat dalam bentuk non-militer dan hibrida.

Mengutip Dokumen Strategis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke-21, ancaman tersebut memiliki sifat dan digolongkan pada ancaman faktual dan ancaman potensial. Ancaman faktual dapat diartikan sebagai berbagai ancaman di bidang militer, non-militer, dan hibrida seperti hal tersebut dapat terjadi dan berkembang secara dinamis bahkan terus berlangsung, baik di dalam negeri maupun internasional, yang mempengaruhi kedaulatan nasional, keutuhan pada wilayah Indonesia, dan keamanan nasional. Berbagai ancaman tersebut diantaranya klaim wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pihak asing, pelanggaran perbatasan wilayah, intervensi yang dilakukan pihak asing, separatisme oleh kelompok tertentu, pemberontakan anggota bersenjata, penyanderaan warga negara Indonesia, perompakan, pembajakan, terorisme dan radikalisme, serangan siber, ancaman intelijen



atau spionase, ancaman yang mempengaruhi psikologis, bencana alam dan lingkungan, pengambilan sumber daya alam, endemi penyakit, penjualan dan penyalahgunaan narkoba, konflik SARA serta dampak negatif dari Revolusi Industri 4.0. Disisi lain, ancaman yang berpotensi akan datang dan belum terjadi, tetapi di masa yang akan datang dalam kondisi tidak terduga sehingga menjadi sebuah ancaman faktual. Berbagai ancaman dapat berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman akibat dampak dari berkembangnya senjata bertenaga nuklir, serangan senjata biologi, serangan senjata kimia, krisis ekonomi, dan serangan menggunakan e-bomb (Kementerian Pertahanan RI, 2021).

Melihat salah satu ancaman faktual terkait klaim wilayah NKRI oleh pihak asing dan pelanggaran wilayah perbatasan sangat memungkinkan karena Indonesia berbatasan dengan 10 Negara. Wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam sesuai dengan UU RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Melalui undang – undang maupun hukum internasional, terbentuklah klaim perbatasan diantaranya pada wilayah darat, perairan, bawah laut serta tanah dan ruang udara yang berada di atasnya. Hal ini melalui perjanjian antara dua pihak negara dan / atau lebih yang berkaitan dengan pemisah antara darat, laut, dan udara.

Ancaman maritim yang ada di Indonesia diprediksi semakin bertambah dengan aktivitas ekonomi yang meningkat di wilayah perairan Indonesia. Padahal sebagai negara kepulauan, masyarakat Indonesia juga berusaha memanfaatkan laut untuk kehidupannya terutama pada wilayah pesisir. Untuk mengurai hingga meniadakan berbagai ancaman tersebut diperlukan pertahanan maritim yang kuat. Salah satu pertahanan maritim tersebut dapat dilakukan pada wilayah pesisirnya.

Berpacu pada data yang dimiliki *World Atlas* bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara yang garis pantainya terpanjang di kawasan Asia serta terpanjang ketiga di dunia. Garis pantai yang dimiliki negara Indonesia berkisar 99.083 km dengan menunjukkan berbagai variasi bentuk lanskap yang ditimbulkan faktor



alam maupun faktor manusia daerah di sepanjang pantai Indonesia menunjukkan (Nag, 2017). Jika memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir, maka Indonesia juga sedang mengelola sumber daya nasional. Dengan itu, diperlukan pertahanan maritim yang kuat terutama di wilayah pesisir negara Indonesia.

Namun pada saat rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa dari total masyarakat paling tinggi tingkat kemiskinannya, mereka berdomisili pada 147 kabupaten / kota wilayah pesisir yaitu sebesar 1,3 juta orang atau diperkirakan 12,5 persen dari total masyarakat miskin sebesar 10,85 juta orang. Data tersebut selaras dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu kemiskinan pada tingkat nasional tercatat sebanyak 27,54 juta orang atau sebesar 10,14 persen dengan kemiskinan pada tingkat tinggi sebesar 4 persen atau 10,86 juta orang pada tahun 2021 (Haetami, 2021). Melihat kenyataan bahwa kemiskinan sulit terlepas dari masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir. Padahal, potensi dari sumber daya alam khususnya di laut sangatlah besar. Diperkirakan sebanyak 12,54 juta ton per tahun kapasitas sumber daya ikan Indonesia yang dapat dilestarikan pada perairan yang ada dalam wilayah Indonesia dan perairan yang ada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Deputi SD Maritim, 2020).

Karena itu, masyarakat yang berada serta bermata pencaharian di wilayah pesisir patut diberdayakan. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Perekonomian yang kuat pada suatu negara dapat menopang pertahanan negara. Seperti yang disampaikan oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji bahwa perekonomian dan pertahanan negara dapat dilambangkan seperti dua bagian berdampingan dari mata uang yang keberadaannya tidak dapat terpisahkan (Wardi, 2020).

Perekonomian yang baik dapat menopang dan mendukung pertahanan negara melalui pembelanjaan militer yang dibutuhkan. Sebaliknya dengan pertahanan negara yang baik, masyarakatnya dapat dengan aman melakukan aktivitas perekonomian.



Masyarakat pun dapat secara bijak memanfaatkan lau karena merasa terjamin keamanannya. Sehingga, perekonomian dan pertahanan hakikatnya saling melengkapi demi meningkatkan eksistensi negara tersebut dalam persaingan tingkat internasional.

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu tugas dan fungsi dari TNI dalam hal ini pada Angkatan Laut yang dijabarkan pada UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam tugas pokoknya berkaitan operasi militer selain perang yakni TNI wajib melakukan dan melakukan berbagai program pemberdayaan di bagian daerah pertahanan dan kekuatan pendukungnya dengan berfokus pada sistem pertahanan semesta yang tertuang pada UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Didalamnya dijelaskan bahwa pertahanan negara perlu dipersiapkan sejak awal terutama pada masa damai oleh pemerintah dengan mengerahkan seluruh partisipasi dari masyarakat yang berada dalam negaranya, bagian dari wilayahnya, dan segala sumber daya yang bersifat nasional dengan saling berintegrasi satu sama lainnya demi menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman yang ada.

Seperti penjelasan di atas bahwa pertahanan negara yang baik dapat diwujudkan melalui partisipasi dari masyarakat khususnya pada wilayah pesisir, yang sangat berpotensi dijadikan sebagai komponen cadangan dalam menopang tugas serta kewajibannya dengan fungsi TNI AL sebagai komponen utama dalam pertahanan negara. Melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal ini yaitu nelayan, selain melakukan kegiatan perekonomian di laut mereka juga dapat menjadi pionir pendeteksi berbagai ancaman atau hal yang mencurigakan di laut. Pemerintah secara khusus TNI AL patut menyadari betapa besar potensi peran sumber daya maritim yang ada. Melalui pemberdayaan tersebut, masyarakat pesisir dapat memahami bahwa perekonomian serta pertahanan harus berjalan berdampingan. Pada akhirnya, konsep Poros Maritim Dunia yang memiliki arti bentuk upaya pemerintah dalam menjadikan laut sebagai tokoh utama dalam pertahanan dan ekonomi dapat dicapai demi mencapai kepentingan nasional Indonesia.



## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Teori Strategi

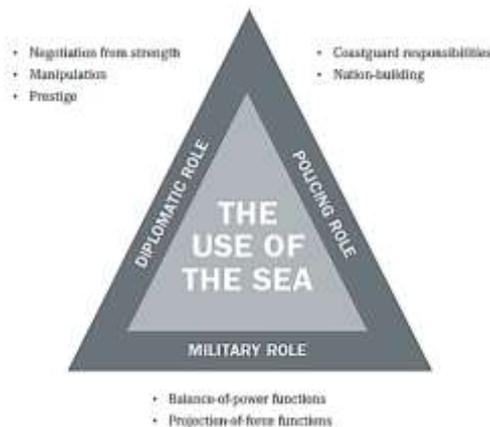
Kalangan militer profesional sejak zaman dahulu telah menggunakan “konsep strategi” sebagai dasar dalam menghadapi perang ataupun pertempuran. Semakin berkembangnya lingkungan atau medan perang dari waktu ke waktu menyebabkan berkembangnya pula teori strategi yang digunakan. Dimana pengalaman dan sejarah perang atau pertempuranlah yang digunakan para pencetus teori dalam memperoleh teori baru yang lebih mendalam serta memiliki kaitannya dengan pembentukan strategi. Namun, teori strategi pada hakikatnya memiliki penekanan pada kepentingan nasional (*national interest*) yang penting menuju “eksistensi dan kedaulatan suatu negara” (Supriyatno, 2014).

Teori “strategi” disampaikan Terry L. Deibel memiliki sudut pandang yang luas dan sempit. Sudut pandang secara sempit pada strategi dimaksudkan pada sebuah rancangan maupun hal yang akan dilakukan untuk sebuah tujuan tertentu (*ends*), berbagai sarana yang dibutuhkan serta digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (*means*), dan seluruh cara bagaimana sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam mencapai tujuan (*ways*), dengan seluruh faktor yang dimiliki menjadi pertimbangan dalam menentukan tujuan (*ends*), sarana (*means*), dan cara (*ways*). Sedangkan, sudut pandang yang lebih luas mengenai strategi bagaimana melihat kepentingan serta ancaman yang ada dapat mempengaruhi tujuan, kemampuan, dan berbagai faktor pendukungnya secara eksternal seperti konteks internasional dan secara internal seperti dalam menjalankan rencana strategis di tingkat domestik (Deibel, 2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah atau berbagai cara (*ways*) yang digunakan dalam mengelola instrument atau sarana (*means*) yang dimiliki untuk mencapai kepentingan nasional (*ends*) (Deibel, 2007).

### 2.2. Teori Strategi Pertahanan Laut

Teori strategi secara spesifik juga digunakan berbagai negara maritim. Seorang ahli maritim dari Amerika Serikat yang tenama pada akhir abad 19 bernama Alfred Thayer Mahan menuliskan sebuah karya dengan menjadikan Inggris sebagai objek penelitian negara maritim. Kemudian, teori strategi maritim yang dicetuskan Mahan ini digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai sebuah negara maritim yang kuat. Mahan merumuskan teori strategi maritim dengan menentukan syarat – syarat utama dalam mengembangkan kekuatan maritim suatu negara. Terdapat enam karakter utama, antara lain bagaimana posisi geografis menentukan penggunaan wilayahnya (*geographical position*), bentuk wilayah serta pantai (*physical conformation*), seberapa besar luas wilayah (*extent of territory*), seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian (*number of population*), karakter bangsa / nasionalisme (*national character*), dan karakter pemerintah (*character of the government*) serta didalamnya kementerian dan lembaga nasional (Mahan, 1894 ).

Gambar 1. *Trinity Roles* oleh Ken Booth



Selanjutnya, dalam penggunaan *naval power* tidak dapat dilepaskan sebagai pendukung *sea power* yang ada. Kekuatan maritim dijabarkan sesuai dengan fungsi penggunaan kekuatan laut untuk bidang maritim menurut teori Ken Booth yaitu fungsi diplomasi, fungsi militer, dan fungsi konstabulari (fungsi polisionil) (Booth, 1977). *Trinity Roles* oleh Ken Booth tersebut digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia matra Laut (TNI AL) dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Fungsi diplomasi dapat dijabarkan sebagai penggunaan kecakapan dalam berkomunikasi serta bernegosiasi



dalam melindungi wilayah perairan territorial maupun ZEE yang dimiliki Indonesia. Kedua yaitu fungsi militer untuk menyeimbangkan kekuatan (*balance of power*) serta kemampuan penangkalan bagi ancaman yang berpotensi masuk pada wilayah Indonesia. Ketiga yaitu fungsi konstabulari atau polisionil dengan menggunakan hukum laut baik nasional maupun internasional dalam patrolinya secara khusus pada wilayah – wilayah perbatasan untuk mendukung pembangunan nasional.

### **2.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Pemberdayaan wilayah melalui pemberdayaan masyarakatnya dijelaskan dalam UU RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan berbagai upaya penggunaan Sumber Daya Pesisir melalui pemberian fasilitas yang memadai serta seluruh perbuatan membantu Masyarakat Pesisir agar dapat melakukan aktivitas maritimnya dengan cara yang terbaik. Masyarakat yang patut diberdayakan yaitu para nelayan yang bersifat tradisional dalam menjala ikan, nelayan bersifat modern dalam menjala ikan, masyarakat yang membudidayakan dan mengusakan ikan agar bermanfaat, para pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, para pengusaha di bidang perikanan, dan masyarakat yang tinggal pada wilayah Pesisir.

### **3. Metode Penelitian**

Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan berbagai data digunakan diantaranya buku, artikel jurnal, artikel berita, serta berbagai dokumen negara pendukung adalah data sekunder penelitian ini. Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui studi Pustaka dengan menjadikan berbagai konsep serta teori sebagai dasar dari pemikiran peneliti yang dituangkan dalam analisis mendalam pada bagian pembahasan. Setelah itu muncullah kesimpulan serta berbagai rekomendasi yang diberikan peneliti untuk kelanjutan hasil dari penelitian ini (Sugiyono, 2013). Peneliti menggunakan *grand theory* yaitu Strategi Pertahanan Laut dengan analisis konsep *Sea Power* oleh A. T. Mahan serta *Trinity Roles* oleh Ken Booth,



*middle theory* yaitu Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dan *apply theory* yaitu Komponen Cadangan pada matra laut. Teori ini akan digunakan dalam menginterpretasikan pemahaman peneliti dalam menganalisis bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai salah satu strategi pertahanan Maritim Indonesia.

#### 4. Hasil dan Diskusi

Melalui visi pemerintah untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat berjalan dengan penggunaan kekuatan lautnya dalam keenam karakter yang mengacu pada geografis Indonesia yang dikelilingi laut dengan pantai atau pesisir yang panjang, mengembalikan sifat nasionalisme berasaskan kemaritiman didukung keterlibatan pemerintah maupun kementerian dan lembaga nasional, serta pada akhirnya dapat memberdayakan pula penduduk yang memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian, secara khusus pada wilayah pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang pemerintah lakukan seharusnya tidak hanya fokus pada kesejahteraan ekonomi saja, namun juga dalam pemahamannya akan bela negara. Disinilah peran TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara menggunakan kemampuannya dalam memberikan pemahaman akan ancaman yang ada pada laut Indonesia. Maka dari itu, masyarakat pesisir dapat diberdayakan sebagai komponen cadangan dalam memperkuat peran TNI AL.

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Komponen Cadangan dapat diartikan sebagai segala Sumber Daya Nasional yang telah dilatih dengan persiapan khusus untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan dari Komponen Utama bidang pertahanan yaitu TNI. Komponen yang bersifat cadangan terbagi kedalam empat kategori, diantaranya komponen cadangan manusia (SDM), komponen cadangan dari alam (SDA), komponen cadangan buatan (SDB), serta komponen cadangan sarana dan seluruh penunjang utama agar dapat terselenggaranya pemanfaatan komponen tersebut. Seluruh sumber daya nasional dipersiapkan agar dapat digunakan saat



sebuah negara berada pada keadaan sulit secara militer yang tidak disangka sehingga memerlukan sebuah penanggulangan segera termasuk menggagu alam. Pengerahan komponen cadangan ini merupakan wewenang mutlak yang dimiliki Presiden atas persetujuan DPR RI dalam mempertahankan negara, serta komponen cadangan perlu digaris bawahi merupakan salah satu program sukarela bukan wajib militer.

Program terkait dengan pertahanan negara telah dilakukan oleh negara – negara besar yang diterapkan melalui berbagai sistem yang berbeda. Diantaranya yaitu *the Army Reserve of United Kingdom* yang merupakan bentuk dari tentara cadangan. Selain itu dalam bentuk *state guard* atau hanya seperti *home guard* diantaranya *the United State National Guard, the Swedish Home Guard, the Norwegian Home Guard, dan the Danish Home Guard*. Negara – negara seperti Korea Selatan, Kolombia, Singapura, Israel, Norwegia, dan Taiwan juga menerapkan sistem tersebut dalam bentuk wajib militer dalam kurun waktu tertentu yang diberikan pelatihan dan keterampilan bidang militer (Nurhuda, Widjayanto, & Prakoso, 2021). Selanjutnya jika kita melihat *China* yang membangun kekuatan milisinya yang dideklarasikan pemerintah China sebagai kekuatan cadangan dari sipil yang dipersenjatai. Tiga tanggung jawab yang dimiliki oleh *China's Maritime Militia*, pertama yaitu untuk mendukung *People's Liberation Army (PLA)* dalam membela *China* dari ancaman eksternal, kedua yaitu untuk membantu pasukan keamanan domestik *China* untuk memastikan stabilitas sosial, dan ketiga *China's Maritime Militia* dimobilisasi untuk terlibat dalam bantuan bencana (Kennedy & Erickson, 2017).

Dengan menjadikan masyarakat pesisir sebagai komponen cadangan secara khusus pada matra laut dapat menghemat pemerintah dalam mengeluarkan biaya untuk perbanyak personil di masa damai serta Alutsista bisa dimodernisasi. Terlebih saat ini, Sistem Teknologi Pertahanan Laut semakin meningkat seiring era digitalisasi. Pada revolusi 4.0 akan banyak merubah teknologi pada bidang militer terutama alutsista yang berbasis digital. Maka dari itu, komponen cadangan matra laut yang berasal dari masyarakat pesisir juga perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar dapat beradaptasi dengan teknologi modern. Teknologi perlu dimanfaatkan sebaik



mungkin agar komponen cadangan tersebut semakin mudah mendeteksi keberadaan ancaman yang berada di laut.

Dengan konsep komponen cadangan dari masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah pesisir tersebut sangat menguntungkan bagi pemerintah dalam menghemat biaya personil. Hal ini karena pada masa tidak aktif, komponen cadangan dalam hal ini masyarakat pesisir dapat kembali kepada profesi dan aktivitas mereka sebagai nelayan, pedagang, pekerja kasar, buruh pabrik, atau lainnya. Sedangkan pada saat laut tidak bisa menjadi tempat mata pencaharian, mereka dapat bekerja sebagai komponen cadangan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat pesisir ini selain meningkatkan kesejahteraan juga dapat meningkatkan rasa bela negara mereka dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia.

## **5. Kesimpulan**

Dengan mengimplementasikan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, pemerintah dalam hal ini TNI AL patut memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang ada. Tak terkecuali dengan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai komponen cadangan matra laut untuk mendukung komponen utama dalam menjaga pertahanan negara terutama di bidang maritim. Menjadikan masyarakat pesisir sebagai komponen cadangan terlatih, dapat meningkatkan pemahaman pada pertahanan. Tak hanya pada negara, tetapi pada pertahanan dirinya sendiri dalam menghadapi ancaman saat bermata pencaharian di laut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertahanan dan perekonomian saling menopang satu sama lain sehingga dapat terciptanya kedamaian serta kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.

Selanjutnya sebagai kelanjutan dari penelitian ini, penulis memberikan tiga rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu membuat sebuah konsep serta kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai komponen cadangan matra laut. Hal ini melihat urgensi saat ini mengenai ancaman yang tak hanya berasal dari militer, namun



non-militer serta hibrida. Dengan menjadikan mereka sebagai komponen cadangan matra laut juga dapat meningkatkan rasa bela negara.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan sistem teknologi pertahanan laut secara khusus bagi masyarakat pesisir, secara khusus nelayan. Pada hal ini, TNI AL wajib memberikan program pelatihan mengenai penggunaan teknologi tersebut dengan harapan teknologi maupun alutsista yang digunakan dapat mendeteksi ancaman yang ada di laut. Ketiga, pembentukkan komponen cadangan matra laut ini harus dilandasi dengan adanya payung hukum yang kuat terkait hak dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dengan landasan yang kuat, pemerintah dapat mensosialisasikan konsep tersebut dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat pesisir yang akan diberdayakan. Dari rekomendasi di atas diharapkan dapat tercapainya keinginan negara Indonesia memiliki pertahanan maritim yang kuat.

### Daftar Pustaka

- Badan Informasi Geospasial. (2021). *Rapat Koordinasi Data Pulau Sepakati Jumlah Pulau Indonesia 17 Ribu*. Retrieved from Badan Informasi Geospasial: <https://big.go.id/content/berita/rapat-koordinasi-data-pulau-sepakati-jumlah-pulau-indonesia-17-ribu>
- Booth, K. (1977). *Navies and Foreign Policy*. ed.1. London: Routledge.
- Deibel, T. L. (2007). *Foreign Affairs Strategy: Logic for American Statecraft*. London: Cambridge University Press.
- Deputi SD Maritim. (2020 ). *Rencana Strategis 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim* . Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Haetami, H. (2021, Desember 22). *Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks, Upaya Pemerintah?* Retrieved from KBR: [https://kbr.id/nasional/12-2021/angka\\_kemiskinan\\_di\\_wilayah\\_pesisir\\_lebih\\_tinggi\\_dan\\_kompleks\\_upaya\\_pemerintah\\_/107146.html](https://kbr.id/nasional/12-2021/angka_kemiskinan_di_wilayah_pesisir_lebih_tinggi_dan_kompleks_upaya_pemerintah_/107146.html)
- Kementerian Pertahanan RI . (2021). *Dokumen Strategis Sistem Pertahanan daan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke-21* . Bogor : Kementerian Pertahanan RI .
- Kennedy, C. M., & Erickson, A. S. (2017). *China Maritime Report No. 1: China's Third Sea Force, The People's Armed Forces Maritime Militia: Tethered to the PLA*. *CMSI China Maritime Reports No. 1*, 1-22.



- KOMINFO. (2016). *Menuju Poros Maritim Dunia*. Retrieved from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata)
- Mahan, A. T. (1894 ). *The influence of sea power upon history, 1660-1783 fifth edition*. Boston: Little, Brown, and Company .
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Nag, O. S. (2017, December 19 ). *10 Countries With The Longest Coastlines In Asia*. Retrieved from World Atlas: <https://www.worldatlas.com/articles/10-countries-with-the-longest-coastlines-in-asia.html>
- Nainggolan, P. P. (2015, September ). *INDONESIA DAN ANCAMAN KEAMANAN DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)*. *Kajian*, XX(3), 183 - 200.
- Nurhuda, N., Widjayanto, J., & Prakoso, L. (2021). Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, I(11).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wardi, R. (2020, Juli 7). *Ekonomi dan Pertahanan Negara Dinilai Saling Melengkapi*. Retrieved from [Beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/archive/653147/ekonomi-dan-pertahanan-negara-dinilai-saling-melengkapi](https://www.beritasatu.com/archive/653147/ekonomi-dan-pertahanan-negara-dinilai-saling-melengkapi)